



Mahathir Mohamad

# Saatnya Guru Belajar ke Murid

## Riset Memacu Pertumbuhan Ekonomi Malaysia

Pada tahun 2020, Malaysia diproyeksikan menjadi negara maju. Arahnya adalah Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*Knowledge Based Economy*), dimana sektor pendidikan menjadi tumpuan utama, khususnya pendidikan tinggi sebagai motor riset dan pengembangan. Dulu Malaysia pernah mengirimkan guru-gurunya belajar ke Indonesia. Sekarang, bagaimana Indonesia dapat belajar dari bekas muridnya ini?

**Bambang Sumintono**

Tahun 2011, Malaysia memasuki tahapan yang disebut sebagai Rancangan Malaysia ke-10 (Tenth Malaysian Plan). Kebijakan perencanaan dan implementasi pembangunan ini mengikuti model pembangunan ekonomi Rostow yang juga sebelumnya sangat populer di Indonesia selama masa Orde Baru. Di Indonesia kita mengenalnya sebagai Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun), dan konsep ini



ditinggalkan setelah Suharto lengser, namun di Malaysia terus berlanjut. Diproyeksikan pada akhir Rancangan Malaysia ke-11 (yaitu tahun 2020), negara jiran ini akan menjadi negara maju dengan penghasilan perkapita yang tinggi.

Tahun 2020 memang menjadi angka yang penting dan selalu di ulang-ulang di Malaysia, karena tahun ini menjadi tonggak pencapaian Wawasan 2020 (Vision 2020) yang mulai dicetuskan oleh PM Mahathir Mohamad pada tahun 1991. Menurut visinya, pertumbuhan ekonomi 7% lebih akan bisa bertahan selama

tiga puluh tahun (1990-2020). Namun, sayangnya impian ini sempat dikoreksi oleh krisis finansial Asia tahun 1997 lalu, yang juga membawa dampak perubahan tataran politik Malaysia sampai sekarang.

Sejak itu pertumbuhan ekonomi Malaysia tidak mencapai 'angka keramat' 7% itu, malah yang paling sial adalah tahun 2009 lalu dimana negara ini mengalami pertumbuhan ekonomi negatif (-1,7%) pada saat negara ASEAN lain seperti Indonesia dan Vietnam justru tumbuh mencapai 4% lebih.

Impian 2020 seolah menjadi takdir dan pertarungan yang penting bagi Malaysia, berbagai riset dan kajian

dikerjakan untuk mencari cara baru bagaimana bisa mencapai mimpi 2020 tersebut. Hal ini pun disesuaikan dengan penyusunan kembali model ekonomi yang akan digunakan dengan berakhirnya Rancangan Malaysia ke-9 di tahun 2010 lalu. Bermunculanlah jargon-jargon baru seperti New Economic Model (NEM), Economic Transformation Program (ETP), Government Transformation Program (GTP) yang menunjukkan perubahan struktur secara mendasar dalam pembangunan ekonomi.

Pemerintah Malaysia sudah mafhum bahwa mengandalkan pembangunan



ekonomi pertanian dan manufaktur saja sudah tidak mampu lagi mendukung pertumbuhan ekonomi yang bisa menyejahterakan rakyatnya. Misalnya dalam hal pertanian, Malaysia sangat tergantung pada buruh dari negara lain (mayoritas Indonesia) untuk memproduksi dan mengolah hasil pertanian. Demikian juga dalam bidang manufaktur.

Dalam beberapa kesempatan dimana buruh pabrik dan pertanian menikmati libur dan berwisata ke kota-kota besar di Malaysia, ternyata membawa dampak psikologis yang 'mengerikan' bagi publik Malaysia karena jumlah mereka yang sangat besar dan menjadikan warga lokal terlihat menjadi minoritas (jumlah tenaga kerja asing di Malaysia mencapai 3 juta jiwa termasuk yang ilegal, jumlah itu setara dengan 10% penduduk Malaysia).

Maka mulai rancangan ke-10 ini pemerintah mulai beralih peran dan tidak melulu mengandalkan pembangunan infrastruktur untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Secara terbuka, disebutkan bahwa Malaysia akan lebih banyak mengadopsi model Knowledge Based Economy (KBE). Sektor swasta sebagian jatah untuk banyak berkiprah karena pemerintah maksimal hanya menyumbang dana investasi untuk pembangunan 10% saja. Penyusunan dokumen kebijakan NEM dan ETP pun ternyata lebih banyak didominasi oleh pihak swasta, karena memang disamping punya duit dan pengalaman, pihak swasta juga yang lebih tahu peluang bisnis dan investasi bidang apa saja yang akan memberikan keuntungan di kemudian hari.

Untuk menuju KBE, maka sektor pendidikan menjadi tumpuan utama yang bisa digerakkan oleh pemerintah, khususnya pendidikan tinggi dalam kegiatan riset dan pengembangan. Pada Rancangan Malaysia ke-9, diperkenalkan suatu skim pendanaan riset baru yang disebut universitas penyelidikan dan APEX, yang tidak lain adalah stimulus berupa dukungan finansial untuk kegiatan riset dan pengembangan.

Berbagai inisiatif lain pun diperkenalkan dan menjadi populer, misalnya komersialisasi produk yang dilakukan oleh Kementerian Pengajian Tinggi (Ministry of Higher Education/MOHE). Hasil yang diinginkan tentunya adalah tumbuh dan mengakarnya budaya riset di berbagai universitas di Malaysia, yang secara langsung menjadi arena untuk menyiapkan generasi baru peneliti. Juga tak kalah pentingnya adalah makin banyak dan kualitasnya publikasi ilmiah yang dihasilkan yang akan berkontribusi pada meningkatnya mutu dan reputasi universitas-universitas di Malaysia.

Faktor kritikal untuk mendukung KBE dalam lingkup pendidikan tinggi adalah tersedianya dosen yang sekaligus peneliti dengan kualifikasi doktor. Pada saat ini populasi penduduk Malaysia yang mempunyai gelar S3 ada sekitar 8.000 orang, dan jumlah ini dianggap tidak memadai bila negara mau berkiprah dalam KBE yang dimotori oleh aktivitas penelitian, pengembangan dan pengkomersialan produk.

Maka pada Rancangan Malaysia ke-10 diarahkan secara jelas bahwa kualifikasi staf akademik yang lulus PhD ini harus meningkat secara drastis. Untuk kategori Universitas Penyelidikan, bagiannya adalah minimal 75%; dan untuk kategori universitas negeri lainnya 60%.

Sebagai perbandingan, di Indonesia saat ini total jumlah dosen di seluruh universitas ada 270.000 orang dan yang telah lulus dari studi S3 menurut Kemendiknas sekitar 23.000 orang. Jadi kalau diambil rata-rata, dosen dengan

gelar doktor di negara ini belum mencapai 10% dari total populasi.

Sebagai gambaran lagi, di universitas tempat saya bekerja, Universitas Teknologi Malaysia (UTM), saat ini tercatat ada sejumlah 1.500 dosen, 50%-nya sudah berkualifikasi doktor (dari jumlah itu sekitar 120 orang adalah staf internasional yang non Malaysia). Di samping itu lebih dari 300 orang saat ini sedang studi tingkat doctoral di berbagai tempat, kebanyakan di luar Malaysia.

Peningkatan jumlah staf akademik yang berkualifikasi S3 menjadi hal yang krusial bagi universitas negeri di Malaysia, karena bila tingkat kelayakan ini tidak dipenuhi maka tambahan dana riset yang diminta tidak akan pernah dikucurkan oleh pemerintah dalam skim universitas riset atau APEX.

Di UTM pun sejak dua tahun ini dilakukan strategi khusus, dimana dosen-dosen yang kualifikasinya S2 dipindahkan pada fakultas yang khusus mengajar mahasiswa diploma (sehingga tidak dihitung sebagai bagian staf akademik biasa; sedangkan staf yang masih S1 tidak dianggap sebagai dosen serta status kepegawaianya adalah kontrak).

Disamping itu, Malaysia juga agresif merekrut dosen-dosen internasional yang sudah S3 dalam jumlah besar (yang kebanyakan adalah orang Indonesia). Tidak aneh bila dalam waktu dua tahun, persentase dosen/pensyarah yang S3 di UTM naik sampai 12% kepada angka yang ditargetkan (50%). Angka ini pun sebenarnya adalah tingkat persentase terendah di lingkup universitas penyelidikan, taraf kelayakan dosen yang S3 di satu universitas APEX yaitu di Universitas Sains Malaysia (USM) malah lebih fantastis lagi yaitu 92%.

Tentu mencapai angka tersebut pada universitas di sebuah negara berkembang perlu proses panjang dan

berat. USM pun konon menerapkan standar dosen harus S3 mulai sejak pertengahan 1980-an. Semua dosen tanpa kecuali diberikan beasiswa sampai S3 dan bila didapati ternyata tidak lulus maka resikonya adalah dipecat.

Pemerintah Malaysia menargetkan pada akhir Rancangan Malaysia ke-10 (2015) populasi penduduknya yang sudah doktor akan mencapai angka 18.000 orang (meningkat 125%) dalam kurun lima tahun. Disamping mewajibkan staf dosennya harus S3 melalui pendidikan lanjutan di berbagai negara, terdapat inisiatif lain untuk menjadikan warga biasa punya akses untuk taraf pendidikan lebih tinggi itu yang disebut sebagai program MyBrain15.

Program ini tidak lain adalah pemberian beasiswa kepada penduduk Malaysia biasa (bukan

dosen dan tidak bekerja) yang layak untuk studi tingkat lanjut, dimana di dalamnya ada program PhD industri, MyPhD (beasiswa untuk studi PhD) dan MyMaster (beasiswa program magister yang akan menjadi feeder bagi MyPhD). Nominal beasiswa yang diberikan meliputi biaya hidup yang sangat layak, sehingga si penerima tinggal kerja keras saja menyelesaikan riset dan membuat tesis.

Bila program MyBrain15 ini sukses, maka akan tersedia lagi ribuan tenaga akademik berkualifikasi S3 yang bisa menjadi pengajar, peneliti dan pengembang produk yang dibutuhkan oleh universitas setempat dan dunia industri. Salah satu indikator yang selalu didengungkan dalam Wawasan 2020 adalah naiknya pendapatan rata-rata warga Malaysia menjadi US\$ 15.000 per tahun.

Proyeksi Pemerintah Malaysia

di tahun 2020 nanti akan terdapat 60.000 orang penyanggah gelar doktor (meningkat 2-3 kali lipat dari tahun 2015), suatu jumlah yang tentu sulit dikejar oleh Indonesia (negara dengan jumlah penduduk sepuluh kali lipat Malaysia) bila hanya mengandalkan program yang biasa dilaksanakan. Kemungkinan jumlah populasi lulusan S3 kita akan dilewati oleh Malaysia sekitar tahun 2017 atau 2018. Ini semestinya menjadi cambuk untuk pemerintah untuk tidak lengah dan terus berbenah.■

*Bambang Sumintono adalah dosen di Fakultas Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Ia menyandang gelar magister dalam bidang Educational Administration dari Flinders University, Adelaide, Australia dan doktoral dalam bidang Educational Policy dari Victoria University of Wellington, Selandia Baru.*

